



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 233 /KUM/2026

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 100.3.3.2/
31/KUM/2026 TENTANG PENETAPAN PEMEGANG DAN ADMINISTRATOR KARTU
KREDIT PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/59-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, serta adanya surat usulan perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati untuk menunjuk kembali pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong, perlu melakukan Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/31/KUM/2026 tentang Penetapan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/31/KUM/2026 tentang Penetapan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/166/KUM/2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/31/KUM/2026 tentang Penetapan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan pada tanggal 1 April 2026, diubah sebagai berikut:
- Ketentuan dalam Lampiran pada Huruf A Nomor Urut 3, Huruf D Nomor Urut 1, Huruf E Nomor Urut 1, Huruf X Nomor Urut 1, Huruf AA Nomor Urut 1, Huruf DD Nomor Urut 1, Huruf FF Nomor Urut 1, Huruf II Nomor Urut 1, Huruf JJ Nomor Urut 1, dan Huruf LL Nomor Urut 1 diubah sehingga Huruf A Nomor Urut 3, Huruf D Nomor Urut 1, Huruf E Nomor Urut 1, Huruf X Nomor Urut 1, Huruf AA Nomor Urut 1, Huruf DD Nomor Urut 1, Huruf FF Nomor Urut 1, Huruf II Nomor Urut 1, Huruf JJ Nomor Urut 1, dan Huruf LL Nomor Urut 1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 6 Mei 2026.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBDAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD dan Administrator KKPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 233 /KUM/2026
TANGGAL 6 Mei 2026

PEMEGANG DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2026

A. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT NIP. 19670518 199803 2 004	Sekretaris Daerah	Pengguna Anggaran	Pemegang KKPD
2.	MAHFUD NASRUDIN, S.Ak NIP.19850622 201001 1 021	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD
3.	N. WIRAHADI KUSUMA, S.IP, M.IP NIP. 19880526 200701 1 001	Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Kuasa Pengguna Anggaran	Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
4.	AHMAD SAIBANI, S.Ap NIP. 19750809 200801 1 012	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Administrator KKPD
5.	H. HAMRANI, S.Kep.Ns, SH, MM, MH NIP. 19680214 199003 1 005	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Kuasa Pengguna Anggaran	Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
6.	RAHMAWATI, S.Ak NIP. 19820415 200801 2 030	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Administrator KKPD
7.	JELITA ANGGRAINI MEISARAH, ST, M.Eng NIP. 19760519 200312 2 002	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Kuasa Pengguna Anggaran	Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
8.	ALDI RIYANSYAH, S.AP NIP. 19970412 202504 1 001	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Administrator KKPD

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
9.	ZAIN LUKMAN HAKIM, S.ST NIP. 19750314 199903 1 006	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Kuasa Pengguna Anggaran	Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
10.	HARTINI, S.Ak NIP. 19830602 201001 2 027	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Administrator KKPD
11.	IRWAN SETIAWAN, S.AP, MA NIP. 19690118 198903 1 010	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Kuasa Pengguna Anggaran	Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
12.	NOR FARIDAH, S.Ak NIP. 19790909 200604 2 015	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Administrator KKPD
13.	RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP NIP. 19840301 200312 1 003	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Kuasa Pengguna Anggaran	Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
14.	PURNAMA SARI, A.Md.Ak NIP. 19841009 200901 2 004	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Administrator KKPD

B. SEKRETARIAT DPRD

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	ADY FAZAR, S.H., S.Sos, M.H, Kp NIP.19781110 200112 1 003	Sekretaris DPRD	Pengguna Anggaran	Pemegang KKPD
2.	IRHAMSYAH, A.Md NIP. 197904112 200904 1 002	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

C. INSPEKTORAT DAERAH

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	DIYANTO, SE, MT NIP.19711013 200501 1 005	Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	Pengguna Anggaran	Pemegang KKPD
2.	SUMIATI NIP. 19801130 200712 2 006	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

D. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	GT. JUDID IHSAN PERMANA, S.STP, M.IP NIP. 19870815 200602 1 001	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	AHMAD REDHANI, S.Ak NIP.19810323 201001 1 019	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD
3.	MUH. AGUS ARDIANTO, S.Pd, M.Pd NIP. 19850824 200904 1 001	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	Kuasa Pengguna Anggaran	Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
4.	RIDHONI SAPUTRA, S.Kom NIP.19970625 202203 1 002	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Administrator KKPD
5.	VIDA AULIA RAHMAN, S.Pd NIP. 19880112 201101 1 005	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Kuasa Pengguna Anggaran	Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
6.	RENNY WIDIYANTI, S.AP NIP.19821207 200701 2 009	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Administrator KKPD
7.	H. AKHMAD SYAMSI, S.Pd NIP. 19721225 199802 1 002	Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran	Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
8.	NIA KURNIAWATY, S.Pd NIP. 19830820 200904 2 003	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Administrator KKPD

E. DINAS KESEHATAN

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	H. AHMAD BAIHAKI, S.Kep., M.M. NIP 19730928 199303 1 005	Kepala Dinas Kesehatan	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	HERBANITA PINONDANG SITINJAK, S.Kep NIP.19890518 201101 2 007	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD
3.	SETYAWAN ANDRI WIBOWO, S.Farm.APT NIP 19871018 201402 1 003	Direktur RSUD H Badaruddin Kasim	Kuasa Pengguna Anggaran	Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
4.	EKA SAMIANA ELPA NIP 19850111 201101 2 012	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Administrator KKPD

F. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	H. WIBAWA AGUNG SUBRATA, ST, MT NIP.19680714 199703 1 004	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	FANY TANDIOPANG, A.Md.Pjk NIP.19970718 202012 2 014	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD
3.	Hj. Ir. SUNENGSI, ST NIP. 19771009 200701 2 010	Kepala Bidang Bina Marga	Kuasa Pengguna Anggaran	Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
4.	TRI HARIANTI NIP. 19690413 200604 2 007	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Administrator KKPD
5.	Ir. IWAN ROMAIDI, ST, MA NIP. 19780416 200501 1 011	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Kuasa Pengguna Anggaran	Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
6.	LAILA FITRIANI NIP. 19681221 200604 2 008	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Administrator KKPD

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
7.	Ir. WAHYU HIDAYAT, ST NIP. 19790212 201001 1 022	Kepala Bidang Cipta Karya	Kuasa Pengguna Anggaran	Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
8.	ENDANG PURWANINGSIH, S.AP NIP. 19720901 200701 2 015	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Administrator KKPD

G. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	H. SLAMET RIYADI, ST NIP. 19670815 199603 1 004	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	HERLINA NIP. 19810731 200701 2 006	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

H. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	AHMAD FAUZI, SH, M.Si NIP. 19700716 199803 1 011	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	DEDY RAHMADI NIP. 19821207 200501 1 005	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

I. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	H. SYAM'ANI, SP, MP NIP. 19750504 200003 1 012	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	GUSTI NILFA ELFARISIE YUSMAR, A.Md NIP. 198207 20 200501 2 014	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

J. DINAS TENAGA KERJA

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	HADY ISMANTO, S.Sos, M.AP NIP. 19760717 199511 1 001	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	DESSY HERAWATI, SE NIP. 19831225 201101 2 013	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

K. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	H. FAHRUL RAJI, S.Pi., M.AP NIP. 19691111 199703 1 006	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	AKHMAD JAYADI NIP. 19740518 200701 1 016	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

L. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	ERFIN NIRZA SIREGAR, ST, MM NIP. 19710928 200003 1 003	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	NOVIANSYAH, A.Md NIP. 19831115 200801 1 017	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

M. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	Ir. ROWI RAWATIANICE, MT NIP. 19661125 199403 2 003	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	ADFIANI, S.AP NIP. 19891105 202203 2 002	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

N. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	H. ADITYA PULANUGRAHA, S.STP, M.IP NIP. 19861223 200602 1 001	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	AIS RAHMAD, S.Ak NIP. 19830625 200801 1 012	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

O. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT NIP. 19780805 199612 1 002	Kepala Dinas Perhubungan	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	NOOR HIDAYATULLAH, A.Md.Ak NIP. 19810516 200801 1 019	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

P. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	EDDY SURIYANI, S.Sos, MA NIP. 19741223 199403 1 004	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	M. RAMADHANI, S.Kom NIP. 19980114 202203 1 003	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

Q. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	SOLEH, SP, MP NIP. 19700217 199503 1 002	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	RICI SUPIALILA, SE NIP. 19860815 201001 2 030	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

R. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	MUHAMMAD RASYID, S.Sos, MH NIP. 19700305 199002 1 001	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	HAZATUL LAILA, S.AP NIP. 19790116 200701 2 024	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

S. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si NIP. 19700809 199003 1 003	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	HIDAYATULLAH, S.Pd NIP. 19751025 200604 1 010	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

T. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	Hj. NORHAYATI, SE., M.Si NIP. 19690203 199803 2 005	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	PITRI HERIAWATI NIP. 19830413 201212 2 002	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

U. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	ARIANTO, S.IP, M.Si NIP. 19680515 199003 1 008	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	MULNGADI, A.Md NIP. 19790125 200701 1 014	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

V. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	Dr. HUSIN ANSARI, SE, ME NIP. 19800610 200501 1 014	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	ERVANA AISYAH FERNANDA, A.Md.Ak NIP. 19970724 202203 2 001	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

W. BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si NIP. 19720306 199203 1 004	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	MANIMBUL P.S. PAKPAHAN, A.Md.Pnl NIP. 120011024 202302 1 003	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

X. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	FAUZAN, S.Sos NIP. 19790127 199903 1 003	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	LISDA KARLINA, S.Kom NIP. 19981119 202504 2 001	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

Y. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	HARIS FAKHROZI, ST, MT NIP. 19721024 200501 1 004	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	HERIYADI RUSDIN, A.Md NIP. 19780921 201001 1 011	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

Z. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	Drs. ARBUANSYAH, MA NIP. 19730207 199311 1 003	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	M. NOR IFANSYAH, A.Md.Ak NIP. 19810621 200801 1 014	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

AA. KECAMATAN TANJUNG

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	ABDUL WAHID, SE, Kp NIP. 19770717 199903 1 008	Camat Tanjung	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	KARTIKA ALFAUZAWATI, A.Md.Ak NIP. 19980421 202012 2 004	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

BB. KECAMATAN MURUNG PUDAK

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	H. RONY SAPUTRA, S.STP, MIP NIP. 19850918 200312 1 002	Camat Murung Puduk	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	NUR HALIDA, A.Md NIP. 19961220 202012 2 019	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

CC. KECAMATAN TANTA

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	Drs. ROFIK AZIDDIN, ME NIP. 19731212 199903 1 009	Camat Tanta	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	TABERANI NIP. 19730309 200906 1 006	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

DD. KECAMATAN MUARA HARUS

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	JATI AKBAR, S.IP., M.M., Kp NIP. 19770129 200501 1 006	Camat Muara Harus	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	MAHMUDI HAKKI, A.Md.Ak NIP. 19820215 200701 1 005	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

EE. KECAMATAN BANUA LAWAS

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	ARIANTO, S.STP, M.M NIP. 19800104 199810 1 002	Camat Banua Lawas	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	INTAN PERMATA SARI, A.Md NIP. 19941207 202012 2 026	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

FF. KECAMATAN KELUA

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp NIP. 19700914 199503 1 006	Camat Kelua	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	IKBAR NIP. 19790520 200604 1 015	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

GG. KECAMATAN PUGAAN

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	FARITH YUSRIANNUR RIZA, SH, Kp NIP. 19720808 200501 1 011	Camat Pugaan	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	NOVITA SARI, A.Md.Pjk NIP. 19960508 202012 2 021	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

HH. KECAMATAN JARO

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	H. MAHMUD RIYADI, S.Sos.Kp NIP. 19731209 199403 1 004	Camat Jaro	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	ERMA FITRIANI, A.Md NIP. 19881030 202012 2 016	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

II. KECAMATAN MUARA UYA

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	MULYADI, S.Sos, Kp NIP. 19690610 200012 1 005	Camat Muara Uya	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	HARTONO NIP. 19751028 200501 1 013	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

JJ. KECAMATAN HARUAI

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	AIDY RISYAWAL, S.STP, M.Sos NIP. 19900502 201010 1 001	Camat Haruai	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	AKHMAD SAIDILLAH, A.Md NIP. 19971006 202012 1 005	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

KK. KECAMATAN UPAU

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	AGUSTIAN, SE,Kp NIP. 19830809 200501 1 004	Camat Upau	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	GATOT SUKMANA NIP. 19790615 200701 1 026	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

LL. KECAMATAN BINTANG ARA

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	AMRULLAH, SE, Kp NIP. 19790706 200312 1 003	Camat Bintang Ara	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	FATHURRIYADLAH, A.Md NIP. 19750710 200604 2 031	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIAS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBDIN/KASUBDAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI